

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aditama, Hafidh. *Transisi Aparatur Sipil Negara Menuju Ibu Kota Negara “Nusantara.”* IKN: Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), 2022. www.kememparekraf.go.id.
- Aldomoro. *Memperkuat Status Daerah Khusus Bagi Ibu Kota Negara (Ikn) Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Lemhannas RI, 2023.
- Amrah Muslimin. *Aspek - Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni Bandung, 1978.
- Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*. 2 ed. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Bagir Manan. *Beberapa Catatan tentang Penafsiran*. Agustus. Vol. 285. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009.
- Bryant, Carolie, Louis G. White. *Manajemen pembangunan untuk negara berkembang*. Indonesia: LP3ES, 1987.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1945, pp. Hal. 35.
- IKN. Otk. Otorita Ibu Kota Nusantara. *Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara*. Jakarta, 2022. www.peraturan.go.id.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 171.
- Juanda. *Hukum pemerintahan daerah: pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah*. Alumni, 2008.

KEMENHUB RI. "Ibu Kota Negara Nusantara." Nusantara, 2024.

Kementerian PPN/Bappenas. *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. IKN, 2021.

Lambelanova, Rossy, Riyan Jaelani, and Vinda Verina KDP. *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. Buku Literatur IPDN, 2022.

Maruf, Muhammad Farid. *Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah*. Surabaya: Unesa University Press, 2020.

Muluk, M. R. Khairul (Mujibur Rahman Khairul). *Desentralisasi dan pemerintah daerah*. Bayu Media, 2006.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273209592064.bib?lang=en>.

Nusantara. *Mewujudkan Cita-Cita Bersama*. IKN, 2023.

Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Kata Hasta Pustaka, 2011.

JURNAL

Abdul, Torik, dan Aziz Wibowo. "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).

Abikusna, R. Agus. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *SOSFILKOM* XIII, no. 01 (Juni 2019).

Aditua Fandhitya Silalahi, Sahat. "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara." *Info Singkat* 11, no. 16 (Agustus 2019).

Agus Diana, Bambang, and Refita Aulina. "Analisis Inovasi Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta: Service Poin Pelayanan Perizinan Pasar Rebo." *Jejaring Administrasi Publik*. Vol. 12, 2020.

- Ahliyan, Yusqiy. "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Yusqiy Ahliyan." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (Desember 2022).
- Al-Hamid, Syarif Anwar Said, Ade Firmansyah, dan Siti Khoiriah. "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (30 Desember 2023).
- Awal Haryanto. "Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 9, 2016.
- Budi Sejati, Sidiq. "Tantangan Pengelolaan Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara." *Info Singkat XIV*, no. 9 (2022).
- Dhea Putri Sri Wahyuniarti, Lego Karjoko, dan Rosita Candrakirana. "Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui *Online Single Submission* Risk Based Approach." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (14 Maret 2024): 290–97.
- Erlina, Maria Resta, dan Wahyu Krisnanto. "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan *Online Single Submission*." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (1 Agustus 2022): 93–103.
- Esri Edhi Mahanani, Anajeng. "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Res Publica*, no. 2 (2017).
- Fahlevy, Muhammad Reza, dan Burhanudin Burhanudin. "Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar)." *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (30 Juli 2022): 74–84.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, dan Faraz Arelia. "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (November 2022): 57–69.

- Fauzi, Fahrul, dan Suparjo Sujadi. “Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara.” *Tunas Agraria* 6, no. 3 (6 September 2023): 171–86.
- Gelora Mahardika, Ahmad, dan Rizky Saputra. “Problematisasi Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 2, no. 1 (Maret 2022)..
- Gultom, Iqbal.S., TDanny Anggoro, dan Hadi Pramono. “Analisis Perbedaan Kebijakan Standar Perizinan Reklamasi pada Wilayah Pelabuhan dan Selain Pelabuhan.” *JLAP*. Vol. 9, 2023.
- Gusnaeni, Reka, Firmansyah Putra, Jl KM Jambi-Muara Bulian No, Mendalo Darat, dan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru.” *Limbago : Journal of Constitutional Law*. Vol. 3. Online, 2023.
- Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani. “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah.” *Majalah Hukum Nasional* 52 (16 Desember 2022).
- Hadi, Fikri, dan Rosa Ristawati. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (10 November 2020): 530–57.
- Hadin Muhjad, M, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, dan Kalimantan Selatan. “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).
- Harahap, Muhammad Hanafiah, Mahasiswa Magister, Hukum Ui, dan Info Artikel Abstrak. “Kajian Argumentatif Terhadap Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023): 2598–9944.

- Khairi, Mawadu. "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Jatiswara* 3 (2020).
- Kurniawan. "Pelaksanaan Kewenangan Khusus Pemerintahan Menurut Uu No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)." *Yustisia* 5, no. 2 (Agustus 2016).
- Laksana, Wahyu. "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (Oktober 2022).
- Lie, Merissa Bhernaded. "Sistem Perizinan Berbasis Risiko : Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia." *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (29 Juni 2022).
- Mega Christia, Adissya, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (2019).
- Mulyono, Slamet Budi, Erwin Owan Hermansyah, dan Rr Dijan Widijowati. "Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 3, no. 2 (2023).
- Ningsih, Kurnia. "Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas Pmptsp Kab. Lombok Timur)." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (30 November 2023): 10–17.
- Nur Aisyah, Siti, dan matul Huda. "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Prosiding Nasional Hukum Aktual*, Januari 2024.
- Nurdin, M Rizki. "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (Juli 2022): 617–33.

- Pertiwi Darmayanti, Ni Putu Dian Putri, dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. “Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2 Juli 2022): 1923.
- Praditya, Editha, Firre An Suprpto, Yusuf Ali, Surachman Surjaatmadja, dan Rui Duarte. “Nusantara Capital City (IKN): Threats and Defense Strategies for Indonesia’s New Capital.” *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 4, no. 1 (25 April 2023): 21–34.
- Prahadi, Gazhy Diemas, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, dan Santi Hapsari Dewi Adikencana. “Defects of Democracy In The Laws of The Capital of Nusantara.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (1 Januari 2023): 113–20.
- Prayitno, Isnu Harjo. “Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Dalam Perspektif Otonomi Daerah” 4, no. 1 (2023).
- Rauf Alauddin Said Jl Sunaryo No, Abdul, dan Kota Baru. “PEMBAGIAN Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).
- Reyhan, Maulana Arfidata, Leandra Aurelrio Putra Darsono, Muhammad Faqih Al anshari, dan Irwan Triadi. “Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (30 Mei 2024): 9.
- Rizky, Zulfikar Muhammad. “Urgensi Penerapan Prinsip *Checks and balances* Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024): 481–87.
- Sakti, A, dan R S Rakia. “Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdassus.” *JUSTISI*, no. 1 (2021): 14–25.

- Satria Sandy, I Gde. "Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perpektif Otonomi Khusus." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 (2023).
- Setia Negara, Tunggul Ansari. "Normative Legal Research In Indonesia: Its Origins And Approaches." *ACLJ* 4 (2023): 1.
- Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (25 Mei 2015).
- Soleman Sineri, Sadrak, and Nur Aedah. "Implementasi Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dpmpstsp Kabupaten Puncak Jaya." *Jurnal Kebijakan Publik* 6, no. 3 (December 3, 2023).
- Sudjarot, Anton. "Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melaluisistem *Online Single Submission*." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (September 2022).
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (31 Oktober 2022): 2859.
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, dan Lara Indah Yandri. "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18 (Januari 2024).
- Wicaksono, Kristian Widya. "Problematisa Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 4, no. 1 (Maret 2012): 21–28.
- . "Problematisa Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia Desentralization Problems And Challenges In Indonesia." *Jurnal Bina Praja*, no. 1 (April 2012).
- Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta, Waluyo, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo.” *JURNAL DISCRETIE* 4, no. 1 (Maret 2023).

Yusuf Ridhani, Muhammad, Miftahul Ridhoni, Andi Achmad Priyadharma, Program S Studi, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. “Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru.” *SPECTA Journal of Technology* 5 (2021).

WEBSITE

Admin. “Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara.” Hukumonline, 27 Juli 2023.

Admin, “Stranas PK Masih Temukan Tumpang Tindih Perizinan Di Kawasan IKN!,” Stranaspk.id, July 4, 2023.

Ayudiana, Shofi. “Otorita IKN Menerima 369 Letter of Intent dari Calon Investor.” ANTARA, 18 Maret 2024.

Daniel A. Fajri, “Pengamat Sebut IKN Punya Potensi Jadi Proyek Bancakan Korupsi,” Tempo, December 5, 2023.

Danu Damarjati, “IKN Nusantara Tak Demokratis: Pemimpin Tak Dipilih Rakyat-Tanpa DPRD,” Detik News, January 24, 2022.

Dm Harijanti, Slisi. “Kelemahan Fundamental UUD1945: Pra dan Pasca Amandemen.” *UNISIA* XXVI, no. 49 (Maret 2023).

Emir Yanwardhana, “Duh! Investasi Di IKN Sepi, Ternyata Ini Biang Keroknya,” CNBC Indonesia, April 30, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.” 2023, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67).

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41)

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini mengatur perizinan berusaha bagi perusahaan penanaman modal.”2007. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67)

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.”2021. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)